

ABSTRAK

Sejak mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1960, Republik Afrika Tengah tidak pernah lepas dari permasalahan krisis ekonomi, sosial, dan politik. Negara ini telah mengalami setidaknya sepuluh usaha kudeta militer antara tahun 2005 sampai 2015, yang telah memperburuk pembangunan ekonomi dan politik di Republik Afrika Tengah. Keadaan tersebut menjadi semakin buruk akibat banyaknya kelompok pemberontak yang berebut kekuasaan untuk menduduki kursi pemerintahan. Kelompok pemberontak melakukan berbagai kekerasan salah satunya adalah kekerasan seksual berbasis gender yang dilakukan kepada perempuan. Kekerasan seksual berbasis gender tersebut termasuk pemerkosaan di depan umum, pemerkosaan terhadap anak-anak perempuan, di depan anggota keluarga dan masyarakat, perbudakan seks dan paksaan untuk menikah. Akses untuk hukum, kesehatan, dan keadilan sulit didapatkan oleh para korban kejahatan seksual. Dengan gambaran situasi tersebut, penelitian ini ingin menjelaskan mengapa konflik tersebut menyebabkan peningkatan korban kekerasan seksual berbasis gender di Republik Afrika Tengah. Secara spesifik, penelitian ini menggunakan teori pemerkosaan yang melihat pemerkosaan sebagai strategi dalam perang. Selain itu penelitian ini juga menganalisis aktor yang terlibat dalam konflik. Diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan faktor-faktor yang mendorong meningkatnya seksual yang berbasis gender yang terjadi di Republik Afrika Tengah.

Kata-kata kunci: *Kekerasan Seksual Berbasis Gender, Republik Afrika Tengah, Perempuan, Rape dan Kelompok Pemberontak.*

ABSTRACT

Since gained independence in 1960, Central African Republic has faced economic, social and political crisis. The country has experienced at least ten military coup attempts between 2005 and 2015, which have exacerbated economic and political development in the Central African Republic. The situation is worsen due to the many rebel groups fighting for power to occupy the seat of government. The rebel groups carried out various kinds of violence, one of the act is sexual gender based violence committed against women. Sexual gender based sexual violence includes public rape, rape of girls in front of family and community members, sexual slavery and coercion to marry. Access to law, health and justice is difficult for victims of sexual crime to find. With an overview of the situation, this study would like to explain why the conflict caused an increase victims of sexual gender based violence in the Central African Republic. Specifically, this study uses theory of rape where it is seen rape as strategy of war. In addition, this study also analyzed the actors involved in the conflict. It is hoped that this research can explain the factors that drive the increase of sexual gender-based violence occur in the Central African Republic.

Keywords: *Sexual gender based violence, Central African Republic, Women, Rape, and Rebel Groups.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1960, Republik Afrika Tengah harus berhadapan dengan berbagai macam masalah nasional seperti kemiskinan, pemerintahan yang diktator dan korupsi, yang menyebabkan ketidakstabilan politik pada masa tersebut. Hingga sekarang nampaknya Republik Afrika Tengah masih belum mampu untuk keluar dari situasi tersebut, hal ini dibuktikan dengan masuknya Republik Afrika Tengah dalam kategori negara termiskin di dunia (UNHCR, 2018). Hampir tanpa terkecuali, setiap pemimpin Republik Afrika Tengah sejak kemerdekaan memimpin secara diktator. Dalam dekade terakhir, Republik Afrika Tengah telah mengalami setidaknya 10 usaha kudeta militer dan pemberontakan militer dan keadaan pemberontakan yang hampir sama. Akar dari konflik dan ketidakstabilan politik yang berputar terbaru terletak pada tahun-tahun terakhir masa pemerintahan mantan Presiden Ange Félix Patassé, yang berkuasa pada pemilihan tahun 1993 dan digulingkan dalam sebuah kudeta militer oleh mantan kepala staf militer, Jenderal Francois Bozizé pada bulan Maret 2003. Patassé menghadapi beberapa kudeta militer dan pemberontakan militer dalam 10 tahun pemerintahannya, yang menyebabkan perpecahan etnis didalam militer yang pada saat itu terdiri dari mayoritas islam dan kristen (HRW, 2007).

Konflik antar kelompok pemberontak bermula karena terjadi perebutan kekuasaan dengan motif keagamaan di awal tahun 2000. Kemudian pada tahun 2011, terdapat kelompok pemberontak bernama Seleka yang beranggotakan mayoritas islam dan menjadi pusat dari sebagian kekerasan yang terjadi di Republik Afrika Tengah. Pada tahun 2013, kelompok pemberontak tersebut menggulingkan Presiden Francois Bozizé (Nelson, 2016). Kelompok pemberontak Seleka menjarah seluruh kota dan desa, menyebabkan terbentuknya kelompok anti-Balaka (anti-parang atau anti-peluru) yang terdiri dari mayoritas orang kristen. Awalnya hanya sebagai kelompok pertahanan,

namun dari waktu ke waktu menjadi kelompok pemuda bersenjata yang tidak terkendali.

Setelah Seleka berhasil menggulingkan pemerintahan yang ada, mereka merebut kekuasaan dan pemimpin kelompok tersebut Michael Djotodia kemudian mengumumkan dirinya sebagai Presiden Republik Afrika Tengah. Ini merupakan pertama kalinya seorang Muslim memerintah di Negara yang hanya dihuni oleh sekitar 10-15 persen dari negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Kristen (Amnesty International, 2017). Kemudian pada tahun 2016, Republik Afrika Tengah melakukan pemilihan pemeritahan yang resmi, tetapi kekuasaannya tidak meluas hingga luar Ibukota Republik Afrika Tengah, Bangui. Setelah pemilihan pemerintahan yang resmi, Republik Afrika Tengah semakin terpolarisasi antara agama dan etnis. Empat belas kelompok bersenjata sekarang aktif di negara ini. Seleka menghasut sebuah kampanye pemerkosaan, penjarahan dan pembunuhan yang menargetkan komunitas Kristen.

Sejak awal terjadinya krisis di Republik Afrika Tengah, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sekretaris Jenderal dan juga aktor internasional dan regional lainnya, termasuk Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Tengah (ECCAS), Uni Afrika (AU), Uni Eropa (UE) dan Prancis, telah bekerja untuk menemukan penyelesaian konflik antara pemerintah dan pemberontak secara damai, menghentikan pembunuhan, melindungi warga sipil dan memberikan bantuan kemanusiaan. Namun kekerasan yang terjadi di negara tersebut menyebar dan Dewan Keamanan PBB akhirnya menerjunkan misi perdamaian bernama, MINUSCA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic) sebagai *peacekeeper* di Republik Afrika Tengah. Karena melihat pada kenyataannya, kelompok pemberontak yang melakukan kekerasan tidak memiliki kepedulian terhadap hak asasi manusia. Saat ini, sekitar 65-70 persen wilayah tersebut dikendalikan oleh kelompok bersenjata (Odiambo, 2017). Hal ini menyebabkan PBB kesulitan dalam menghentikan kekerasan tersebut.

Salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang berat terjadi terkait dengan kekerasan seksual berbasis gender. Dengan latar belakang ketidaksetaraan gender yang berkelanjutan, KSBG (kekerasan seksual berbasis gender) telah diperburuk oleh konflik dan merupakan salah satu ancaman keamanan tertinggi bagi perempuan dan anak-anak. Menurut laporan Dewan Keamanan PBB pada tahun 2015, kekerasan seksual yang berkaitan dengan konflik terutama pada bulan Januari – Desember 2014 terdapat 2.527 kasus KSBG yang terjadi di Republik Afrika Tengah (Secretary-General, 2015). Sedangkan data pada tahun 2015 sendiri, penyedia layanan di Republik Afrika Tengah mencatat 29.801 kasus perempuan yang selamat dari kekerasan berbasis gender, termasuk pemerkosaan, kekerasan seksual dan perbudakan seksual, eksploitasi seksual, paksaan untuk menikah dan berbagai bentuk kekerasan seksual berbasis gender. Di antara mereka, 27.977 adalah perempuan dan anak perempuan, dan 1.824 adalah laki-laki dan anak laki-laki. Empat puluh empat persen kasus pemerkosaan melibatkan perkosaan geng dan sering dilakukan di depan anggota keluarga (United Nations, 2017).

Permasalahan ini menjadi sangat penting untuk diteliti karena melihat bahwa kekerasan seksual berbasis gender yang terjadi di Republik Afrika Tengah menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Seperti yang diketahui, situasi konflik yang terjadi memicu pelanggaran hak asasi manusia. Semua entitas PBB khususnya penjaga perdamaian, adalah aktor utama yang memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi hak-hak sipil dan mempromosikan hak asasi manusia. Seperti yang dikutip dari Laporan PBB, hampir semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata di Republik Afrika Tengah antara tahun 2003 dan 2015 melakukan berbagai bentuk kekerasan seksual. Para pelaku adalah anggota pasukan keamanan, kelompok pemberontak dan bersenjata, pasukan pemerintah asing dan warga sipil (United Nations, 2017).

Sejauh ini belum ada penelitian yang membahas mengenai topik ini. Namun ada satu jurnal yang dibuat oleh Rozalia pada tahun 2017 berjudul Peran United Nations Human Rights Council (UNHRC) dalam Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual di Republik Afrika Tengah tahun 2013. Dalam Jurnal

tersebut menjelaskan mengenai Peranan UNHRC sebagai Dewan Hak Asasi Manusia PBB dalam konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah. Namun yang terjadi perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut menggunakan Perspektif Pluralisme dimana secara spesifik menggunakan konsep *Human Security*. Penelitian tersebut tidak membahas mengenai banyaknya kasus kekerasan seksual berbasis gender yang masih terjadi di Republik Afrika Tengah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa konflik yang terjadi antara pemerintah dengan kelompok pemberontak meningkatkan kekerasan seksual berbasis gender di Republik Afrika Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan diatas, penelitian ini akan berupaya menjawab pertanyaan:

“Mengapa konflik antara pemerintah dengan pemberontak menyebabkan peningkatan kekerasan seksual berbasis gender di Republik Afrika Tengah?”

1.3 Kerangka Teori

1.3.1 Teori Pemerkosaan dalam Perang

Pemerkosaan yang dilakukan selama perang sering dimaksudkan untuk menyorot warga sipil, memecah keluarga, menghancurkan komunitas, dan dalam beberapa kasus mengubah susunan etnis generasi berikutnya. Pemerkosaan digunakan sebagai senjata perang untuk tetap mempertahankan kekuasaan dan dominasi atas perempuan dan merusak tatanan sosial masyarakat. Pemerkosaan merupakan akar dari adanya ketidaksetaraan, diskriminasi dan dominasi laki-laki. Patologi hubungan gender, seksualitas dan budaya sejatinya saling memiliki ketergantungan. Gagasan mengenai budaya, setidaknya sebagian, ditentukan oleh pemahaman tentang gender, peran gender, dan kekuasaan. Teori-teori yang didasarkan pada hubungan gender, seksual dan budaya menempatkan tiga kekuatan utama yang memotivasi terjadinya pemerkosaan masa perang. Selain itu, adanya ketidaksetaraan gender juga memfasilitasi

adanya kekerasan terhadap perempuan. Menekankan hubungan kekuasaan, inferioritas perempuan lebih lanjut dengan adanya adat, praktik dan peraturan perundang-undangan yang mendiskriminasi perempuan. Adanya feminisasi kemiskinan yang kemudian melegitimasi kekerasan berbasis gender. Khususnya pandangan subordinasi perempuan yang mendorong penggunaan pemerkosaan sebagai senjata perang (Enloe, 2000).

Secara khusus, teori pemerkosaan berpendapat bahwa pemerkosaan digunakan sebagai taktik untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Idennya adalah bahwa perang meningkatkan peluang pemerkosaan melalui perubahan (pengurangan) dalam norma-norma sosial, perubahan dalam kemauan atau kemampuan untuk menghukum para pelanggar, dan peningkatan kontak dengan para calon korban (dengan secara paksa memasuki rumah-rumah untuk penjarahan, atau melalui kamp-kamp pengungsian) (Wood, 2006).

Teori pemerkosaan berpendapat bahwa pemerkosaan digunakan oleh militer sebagai taktik untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Digunakan dengan cara ini, pemerkosaan biasanya dilakukan oleh kelompok bersenjata yang terorganisir dengan baik di bawah perintah untuk menyerang warga sipil dalam upaya untuk memenuhi tujuan perang (Wood, 2006).

Selain itu, teori ini menyiratkan bahwa pemerkosaan hanya akan digunakan di beberapa titik dalam konflik, yang tidak menjelaskan tingkat pemerkosaan yang terus-menerus tinggi yang digunakan oleh beberapa kelompok. Teori ini setuju bahwa pemerkosaan yang terjadi pada masa perang sering kali didasarkan pada efek buruk yang ditimbulkannya terhadap populasi musuh, termasuk penanaman teror, berkurangnya perlawanan sipil, penghancuran moral, penghinaan, penghancuran tentara musuh, dan sebagai akhir dari pembersihan etnis dan genosida.

1.3.2 Elemen Konflik

Selanjutnya, penelitian ini akan menggunakan analisis elemen konflik dari Wallensten yang melihat elemen konflik dari aktor, tindakan dan *incompatibilites* atau ketidakcocokan tujuan dari masing-masing aktor. Elemen konflik yang pertama dilihat dari aktor yang terlibat didalam konflik tersebut apakah aktor negara atau aktor bukan negara. Konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah merupakan konflik bersenjata yang terjadi antara pemerintah dengan kelompok pemberontak. Konflik tersebut dapat dikategorikan sebagai konflik dengan aktor negara. Elemen konflik yang kedua yaitu tindakan yang dapat terdiri dari penyerangan, perang, pernyataan lisan, aksi non-kekerasan, mobilisasi petisi, sanksi dan boikot. Tindakan yang dilakukan dalam konflik di Republik Afrika Tengah adalah perang, dimana pemerintah dengan kelompok pemberontak menggunakan kekerasan khususnya kekerasan berbasis gender sebagai taktik perang.

Elemen konflik selanjutnya adalah adanya *incompatibilities* atau tujuan dari tindakan aktor yang bertentangan. Dalam beberapa hal, konflik atas pemerintah adalah tentang kontrol atas seluruh negara (siapa yang harus mengendalikannya dan bagaimana), sedangkan konflik atas wilayah adalah tentang kontrol bagian dari negara (siapa yang harus mengendalikannya dan bagaimana). Ini terjadi ketika pemberontak Seleka yang berhasil menggulingkan pemerintahan yang ada dan kemudian pemimpin dari kelompok tersebut mengumumkan diri sebagai Presiden di Republik Afrika Tengah. Hal ini memicu ketegangan antar kelompok pemberontak.

1.4 Hipotesis

Hipotesis dari penelitian adalah: Peningkatan KSBG karena dipegaruhi oleh faktor budaya dan pemerkosaan sebagai strategi perang. Stigma perempuan untuk diam ketika mereka menjadi korban kekerasan membuat perempuan mudah untuk dijadikan sasaran dalam perang. Konflik tersebut menggunakan pemerkosaan sebagai strategi dalam perang dilakukan untuk melemahkan musuh dan merusak tatanan sosial.

1.5 Metodologi Penelitian

Jenis metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam kasus kekerasan seksual berbasis gender di Republik Afrika Tengah dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Studi pustaka mengumpulkan data-data sekunder dari buku-buku, artikel-artikel jurnal, majalah, koran, dan artikel-artikel online dengan menggunakan sumber-sumber yang kredibel. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses interpretasi data. Jadi setelah data berhasil dikumpulkan, peneliti perlu memilah, mengkategorikan, dan menafsirkannya supaya sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini dikarenakan data-data yang berhasil dikumpulkan peneliti masih berupa 'data mentah'.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terbagi ke dalam 4 bab:

Bab 1 berisi pendahuluan yang merupakan desain riset dari penelitian ini.

Bab 2 adalah deskripsi mengenai konflik dan kekerasan seksual berbasis gender secara umum. Penjelasan mengenai aktor, tindakan dan ketidakcocokan dengan hubungannya terhadap konflik dan peningkatan kekerasan seksual berbasis gender di Republik Afrika Tengah.

Bab 3 adalah analisis hubungan antara elemen konflik yang ada dengan kekerasan seksual berbasis gender. Bab ini akan berupaya menjawab hubungan meningkatnya kekerasan seksual berbasis gender dengan konflik yang terjadi antara pemerintah dengan kelompok pemberontak di Republik Afrika Tengah.

Bab 4 adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran penelitian lebih lanjut. Bab ini juga akan mengevaluasi kekurangan-kekurangan penelitian ini serta memberikan rekomendasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.